

ANALYSIS OF THE DIFFERENCES IN THE GROSS METHOD, NET METHOD, AND GROSS UP METHOD IN CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE 21 AT PT. SWASTISIDDHI AMAGRA

Widya Rahmawati Simanjuntak¹, Afni Eliana Saragih², Fry Melda Saragih³

Faculty of Economic and Business, Universitas Katolik Santo Thomas¹

Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia Pontianak^{2,3}

Email: ¹widyarahmawati019@gmail.com ²afni.elianasaragih@gmail.com;

³frymeldasaragih@itbss.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze and compare the differences in using the gross method, net method and gross up method in calculating income tax article 21 at PT. Swastisiddhi Amagra. The population of the research is the salaries of 75 employees at PT. Swastisiddhi Amagra and the samples in the research are census samples. This research uses qualitative descriptive research by processing secondary data. The results of this research indicate that the income calculation for article 21 at PT. Swastisiddhi Amagra is in accordance with applicable laws and regulations. However, the method used in calculating income tax article 21 at PT Swastisiddhi Amagra is the gross method. Where this method covers income tax article 21, namely the employee.

Keywords: Income Tax Article 21, Gross Method, Net Method, Gross Up Method

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta membandingkan perbedaan menggunakan metode *gross*, metode *net*, dan metode *gross up* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Swastisiddhi Amagra. Populasi dari penelitian adalah gaji terhadap 75 karyawan pada PT. Swastisiddhi Amagra serta yang menjadi sampel dalam penelitian adalah sampel sensus. Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan mengolah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan penghasilan pasal 21 pada PT. Swastisiddhi Amagra sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Namun metode yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Swastisiddhi Amagra yaitu menggunakan metode *gross*. Dimana metode ini yang menanggung pajak penghasilan pasal 21 yaitu pihak karyawan.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Metode Gross, Metode Net, Metode Gross Up

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui *with holding system*. *With holding system* merupakan sistem pemungutan pajak melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan untuk memotong PPh pasal 21. Namun dalam pelaksanaan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin berbeda dengan pemerintah yang memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.

Ada banyak cara meminimalkan pembayaran pajak, namun wajib pajak harus memperhatikan cara-cara yang tepat untuk penerapannya. Salah satunya adalah dengan mengurangi pengeluaran pajak yang akan dibayarkan dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak terutang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur oleh undang-undang perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan *dispute* antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Pohan (2013:75) manajemen Pajak Penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan menerapkan metode manajemen Pajak Penghasilan pasal 21 yang tepat. Ada 3 metode manajemen pajak penghasilan pasal 21 yaitu, pertama metode *gross*, pada metode ini perusahaan tidak memberikan tunjangan pajak dan tidak menanggung pajak karyawannya, yang artinya karyawan akan

menanggung sendiri pajak penghasilannya yang dipotong langsung dari penghasilan karyawan tersebut. Yang kedua metode *net*, pada metode ini perusahaan yang menanggung pajak karyawan. Metode ketiga yaitu metode *gross up*, pada metode ini perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan pajak yang akan dipotong.

PT. Swastisidhi Amagra merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan kelapa sawit dan perkebunan yang berdiri sejak 1992. Dalam menjalankan usahanya PT. Swastisidhi Amagra tidak lepas dari kewajiban perpajakan baik itu pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dan pajak penghasilan badan atas laba yang diperoleh setiap tahunnya. Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan PT. Swastisidhi Amagra selama ini hanya menggunakan metode *gross* atau seluruh pajak penghasilan terutang pasal 21 karyawan ditanggung oleh Karyawan.

Tabel 1. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross*, *Net*, dengan *Gross Up*

No	Nama Karyawan	Jabatan	Metode Gross	Metode Net	Metode Gross Up
1	Tuan A	Satpam	Rp 1.291.878	Rp 1.291.878	Rp 1.359.872
2	Tuan B	Boiler	Rp 1.054.915	Rp 1.054.915	Rp 1.110.403
3	Tuan C	Kepala Pabrik	Rp 35.408.894	Rp 35.408.894	Rp 47.211.859
4	Tuan D	Sortasi	Rp 172.430	Rp 172.430	Rp 181.505
Jumlah			Rp37.928.117	Rp 37.928.117	Rp 49.863.639

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat pembayaran PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *gross* dan metode *net* berbeda dengan dengan metode *gross up*. Dimana jumlah pembayaran pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *gross* dan *net* sebesar Rp 37.928.117,- sedangkan dengan menggunakan metode *gross up* jumlah pembayaran PPh pasal 21 Rp 49.863.639,-. Walaupun jumlah perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode *gross* dan *net* sama, namun kedua metode ini memiliki perbedaan dalam siapa yang menanggung pembayaran pajak terutang pasal 21.

Dalam metode *gross*, pajak terutang pasal 21 dipotong dari penghasilan karyawan tersebut atau tidak menjadi tanggungan perusahaan, sedangkan dengan metode *net* penghasilan pajak terutang pasal 21 karyawan dibayarkan oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode ini hanya menguntungkan salah satu pihak. Dimana apabila menggunakan metode *gross* pihak yang diuntungkan adalah pihak perusahaan sementara pihak karyawan merasa dirugikan karena penghasilan yang mereka peroleh dipotong untuk pembayaran pajak terutang pasal 21, begitu juga sebaliknya dengan menggunakan metode *net*. PT. Swastisiddhi Amagra menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross*. Sehingga PT. Swastisidhi Amagra tidak memberikan tunjangan pajak bagi karyawannya. Dimana tunjangan pajak tersebut ditanggung sendiri oleh karyawan sehingga gaji bersih karyawan berkurang.

Penelitian terdahulu dengan topik yang sama dilakukan oleh Putra (2022) dengan judul Analisis Metode *Gross Up* Dengan Metode *Net* Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. Anugerah Lancar Sejahtera Jakrta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* PKP yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil serta lebih efisien. Dan dengan menggunakan metode ini dianggap karyawan akan merasa puas dan termotivasi karena PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sehingga gaji yang diterima karyawan lebih besar karena gaji yang diperoleh ditambah dengan tunjangan pajak.

Ramba dkk (2022) juga meneliti dengan judul Analisis Perbandingan Perhitungan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode *Net* dan *Gross Up* Method PT. Pegadaian Cabang Upc Tataraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang lebih efisien digunakan adalah metode *gross up*. Penggunaan dalam metode *gross up* dianggap dapat memuaskan hati dan motivasi karyawan yang ada pada perusahaan ini.

Perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 21 merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti, karena sasarannya sejalan dengan kebutuhan perusahaan yang menitikberatkan pada

peningkatan laba dan juga sejalan dengan keinginan karyawan yang menginginkan kesejahteraan yang lebih baik dari perusahaan tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Metode Gross

Metode Gross merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan yang menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Dari sisi karyawan atau pegawai, pajak penghasilan pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan sehingga karyawan merasa tidak diuntungkan.

Metode Net

Metode Net merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan yang menanggung pajak penghasilan karyawannya. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada metode ini sama dengan metode gross. Hanya aja yang membedakannya adalah pada metode ini pajak penghasilan karyawan, perusahaan yang menanggungnya, sehingga karyawan merasa diuntungkan karena jumlah penghasilannya tidak berkurang.

Metode Gross Up

Gross up method merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Pada metode ini tunjangan pajak yang diberikan perusahaan dapat menjadi biaya fiskal, dan bagi karyawan pemberian pajak ini akan menguntungkan karena gaji bersihnya tidak dipotong pajak karena sudah diberikan tunjangan pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah daftar gaji terhadap 75 karyawan pada PT. Swastisiddhi Amagra. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel sensus. Dimana yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh dari populasi penelitian ini yaitu 75 gaji karyawan yang ada pada PT. Swastisiddhi Amagra.

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang adalah:

- Tahap awal, mengumpulkan daftar gaji dari perusahaan.
- Tahap selanjutnya, menghitung besarnya PPh pasal 21 dengan metode *Gross*, metode *Net*, dan *Gross Up*.
- Setelah itu, membandingkan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross*, metode *Net*, dan *Gross Up*.
- Kemudian peneliti membuat dan mengambil suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan pada tahapan – tahapan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross

Tabel 2. PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan (Metode Gross) PT. Swastisiddhi Amagra Tahun 2019

No	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
1	K/2	Rp 87.817.352	Rp 4.390.868	Rp 373.704	Rp 83.052.780	Rp 67.500.000	Rp 14.431.668	Rp 721.583

No	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
2	K/1	Rp 78.240.920	Rp 3.912.046	Rp 373.704	Rp 73.955.170	Rp 63.000.000	Rp 10.955.170	Rp 547.759
3	K/3	Rp 95.257.532	Rp 4.762.877	Rp 373.704	Rp 90.120.951	Rp 72.000.000	Rp 18.120.951	Rp 906.048
4	K/1	Rp 88.965.069	Rp 4.448.253	Rp 373.704	Rp 84.143.112	Rp 63.000.000	Rp 21.143.112	Rp 1.057.156
5	K/2	Rp 79.320.980	Rp 3.966.049	Rp 373.704	Rp 74.981.227	Rp 67.500.000	Rp 7.481.227	Rp 374.061
6	TK	Rp 84.432.908	Rp 4.221.645	Rp 373.704	Rp 79.837.559	Rp 54.000.000	Rp 25.837.559	Rp 1.291.878
7	K/1	Rp 88.917.908	Rp 4.445.895	Rp 373.704	Rp 84.098.309	Rp 63.000.000	Rp 21.098.309	Rp 1.054.915
8	K/1	Rp 331.009.281	Rp 6.000.000	Rp 373.704	Rp 324.635.577	Rp 63.000.000	Rp 261.635.577	Rp 35.408.894
9	K/1	Rp 70.339.268	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 66.448.601	Rp 63.000.000	Rp 3.448.601	Rp 172.430
10	K/1	Rp 82.348.568	Rp 4.117.428	Rp 373.704	Rp 77.857.436	Rp 63.000.000	Rp 14.857.436	Rp 742.872
11	TK	Rp 70.339.268	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 66.448.601	Rp 54.000.000	Rp 12.448.601	Rp 622.430
12	TK	Rp 66.068.468	Rp 3.303.423	Rp 373.704	Rp 62.391.341	Rp 54.000.000	Rp 8.391.341	Rp 419.567
13	K/1	Rp 80.162.108	Rp 4.008.105	Rp 373.704	Rp 75.780.299	Rp 63.000.000	Rp 12.780.299	Rp 639.015
14	K/1	Rp 70.339.220	Rp 3.516.961	Rp 373.704	Rp 66.448.555	Rp 63.000.000	Rp 3.448.555	Rp 172.428
15	TK	Rp 88.063.088	Rp 4.403.154	Rp 373.704	Rp 83.286.230	Rp 54.000.000	Rp 29.286.230	Rp 1.464.311
16	K/1	Rp 70.339.268	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 66.448.601	Rp 63.000.000	Rp 3.448.601	Rp 172.430
17	K/1	Rp 82.129.760	Rp 4.106.488	Rp 373.704	Rp 77.649.568	Rp 63.000.000	Rp 14.649.568	Rp 732.478
18	K/2	Rp 84.432.908	Rp 4.221.645	Rp 373.704	Rp 79.837.559	Rp 67.500.000	Rp 12.337.559	Rp 616.878
19	K/2	Rp 88.917.248	Rp 4.445.862	Rp 373.704	Rp 84.097.682	Rp 67.500.000	Rp 16.597.682	Rp 829.884
20	TK	Rp 80.162.108	Rp 4.008.105	Rp 373.704	Rp 75.780.299	Rp 54.000.000	Rp 21.780.299	Rp 1.089.015

No	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
21	TK	Rp 72.306.968	Rp 3.615.348	Rp 373.704	Rp 68.317.916	Rp 54.000.000	Rp 14.317.916	Rp 715.896
22	K/1	Rp 84.219.368	Rp 4.210.968	Rp 373.704	Rp 79.634.696	Rp 63.000.000	Rp 16.634.696	Rp 831.735
23	K/1	Rp 75.250.688	Rp 3.762.534	Rp 373.704	Rp 71.114.450	Rp 63.000.000	Rp 8.114.450	Rp 405.722
24	K/1	Rp 69.698.648	Rp 3.484.932	Rp 373.704	Rp 65.840.012	Rp 63.000.000	Rp 2.840.012	Rp 142.001
25	TK	Rp 86.568.308	Rp 4.328.415	Rp 373.704	Rp 81.866.189	Rp 54.000.000	Rp 27.866.189	Rp 1.393.309
26	TK	Rp 67.349.708	Rp 3.367.485	Rp 373.704	Rp 63.608.519	Rp 54.000.000	Rp 9.608.519	Rp 480.426
27	TK	Rp 81.016.268	Rp 4.050.813	Rp 373.704	Rp 76.591.751	Rp 54.000.000	Rp 22.591.751	Rp 1.129.588
28	TK	Rp 67.990.328	Rp 3.399.516	Rp 373.704	Rp 64.217.108	Rp 54.000.000	Rp 10.217.108	Rp 510.855
29	TK	Rp 65.427.848	Rp 3.271.392	Rp 373.704	Rp 61.782.752	Rp 54.000.000	Rp 7.782.752	Rp 389.138
30	K/0	Rp 67.349.420	Rp 3.367.471	Rp 373.704	Rp 63.608.245	Rp 58.500.000	Rp 5.108.245	Rp 255.412
31	TK	Rp 67.349.420	Rp 3.367.471	Rp 373.704	Rp 63.608.245	Rp 54.000.000	Rp 9.608.245	Rp 480.412
32	TK	Rp 85.287.068	Rp 4.264.353	Rp 373.704	Rp 80.649.011	Rp 54.000.000	Rp 26.649.011	Rp 1.332.451
33	K/2	Rp 88.917.248	Rp 4.445.862	Rp 373.704	Rp 84.097.682	Rp 67.500.000	Rp 16.597.682	Rp 829.884
34	K/0	Rp 89.130.740	Rp 4.456.537	Rp 373.704	Rp 84.300.499	Rp 58.500.000	Rp 25.800.499	Rp 1.290.025
35	K/3	Rp 86.354.768	Rp 4.317.738	Rp 373.704	Rp 81.663.326	Rp 72.000.000	Rp 9.663.326	Rp 483.166
36	TK	Rp 71.152.712	Rp 3.557.636	Rp 373.704	Rp 67.221.372	Rp 54.000.000	Rp 13.221.372	Rp 661.069
37	TK	Rp 88.276.628	Rp 4.413.831	Rp 373.704	Rp 83.489.093	Rp 54.000.000	Rp 29.489.093	Rp 1.474.455
38	K/2	Rp 87.636.008	Rp 4.381.800	Rp 373.704	Rp 82.880.504	Rp 67.500.000	Rp 15.380.504	Rp 769.025
39	TK	Rp 81.443.300	Rp 4.072.165	Rp 373.704	Rp 76.997.431	Rp 54.000.000	Rp 22.997.431	Rp 1.149.872

No	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
40	TK	Rp 83.151.572	Rp 4.157.579	Rp 373.704	Rp 78.620.289	Rp 54.000.000	Rp 24.620.289	Rp 1.231.014
41	K/1	Rp 122.950.540	Rp 6.000.000	Rp 373.704	Rp 116.576.836	Rp 63.000.000	Rp 53.576.836	Rp 3.036.525
42	TK	Rp 86.100.608	Rp 4.305.030	Rp 373.704	Rp 81.421.874	Rp 54.000.000	Rp 27.421.874	Rp 1.371.094
43	TK	Rp 88.276.628	Rp 4.413.831	Rp 373.704	Rp 83.489.093	Rp 54.000.000	Rp 29.489.093	Rp 1.474.455
44	TK	Rp 85.073.528	Rp 4.253.676	Rp 373.704	Rp 80.446.148	Rp 54.000.000	Rp 26.446.148	Rp 1.322.307
45	TK	Rp 83.365.208	Rp 4.168.260	Rp 373.704	Rp 78.823.244	Rp 54.000.000	Rp 24.823.244	Rp 1.241.162
46	TK	Rp 70.339.268	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 66.448.601	Rp 54.000.000	Rp 12.448.601	Rp 622.430
47	TK	Rp 67.990.280	Rp 3.399.514	Rp 373.704	Rp 64.217.062	Rp 54.000.000	Rp 10.217.062	Rp 510.853
48	K/1	Rp 77.813.168	Rp 3.890.658	Rp 373.704	Rp 73.548.806	Rp 63.000.000	Rp 10.548.806	Rp 527.440
49	TK	Rp 76.959.008	Rp 3.847.950	Rp 373.704	Rp 72.737.354	Rp 54.000.000	Rp 18.737.354	Rp 936.868
50	TK	Rp 88.276.628	Rp 4.413.831	Rp 373.704	Rp 83.489.093	Rp 54.000.000	Rp 29.489.093	Rp 1.474.455
51	TK	Rp 74.396.528	Rp 3.719.826	Rp 373.704	Rp 70.302.998	Rp 54.000.000	Rp 16.302.998	Rp 815.150
52	K/2	Rp 78.667.280	Rp 3.933.364	Rp 373.704	Rp 74.360.212	Rp 67.500.000	Rp 6.860.212	Rp 343.011
53	TK	Rp 80.162.108	Rp 4.008.105	Rp 373.704	Rp 75.780.299	Rp 54.000.000	Rp 21.780.299	Rp 1.089.015
54	TK	Rp 84.005.780	Rp 4.200.289	Rp 373.704	Rp 79.431.787	Rp 54.000.000	Rp 25.431.787	Rp 1.271.589
55	K/2	Rp 75.677.768	Rp 3.783.888	Rp 373.704	Rp 71.520.176	Rp 67.500.000	Rp 4.020.176	Rp 201.009
56	K/2	Rp 78.453.788	Rp 3.922.689	Rp 373.704	Rp 74.157.395	Rp 67.500.000	Rp 6.657.395	Rp 332.870
57	TK	Rp 65.854.928	Rp 3.292.746	Rp 373.704	Rp 62.188.478	Rp 54.000.000	Rp 8.188.478	Rp 409.424
58	TK	Rp 85.500.608	Rp 4.275.030	Rp 373.704	Rp 80.851.874	Rp 54.000.000	Rp 26.851.874	Rp 1.342.594

No	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
59	K/1	Rp 81.443.252	Rp 4.072.163	Rp 373.704	Rp 76.997.385	Rp 63.000.000	Rp 13.997.385	Rp 699.869
60	TK	Rp 70.339.268	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 66.448.601	Rp 54.000.000	Rp 12.448.601	Rp 622.430
61	TK	Rp 70.339.268	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 66.448.601	Rp 54.000.000	Rp 12.448.601	Rp 622.430
62	K/1	Rp 86.914.148	Rp 4.345.707	Rp 373.704	Rp 82.194.737	Rp 63.000.000	Rp 19.194.737	Rp 959.737
63	TK	Rp 88.276.628	Rp 4.413.831	Rp 373.704	Rp 83.489.093	Rp 54.000.000	Rp 29.489.093	Rp 1.474.455
64	TK	Rp 65.641.340	Rp 3.282.067	Rp 373.704	Rp 61.985.569	Rp 54.000.000	Rp 7.985.569	Rp 399.278
65	TK	Rp 85.287.068	Rp 4.264.353	Rp 373.704	Rp 80.649.011	Rp 54.000.000	Rp 26.649.011	Rp 1.332.451
66	K/1	Rp 73.801.748	Rp 3.690.087	Rp 373.704	Rp 69.737.957	Rp 63.000.000	Rp 6.737.957	Rp 336.898
67	TK	Rp 120.000.000	Rp 6.000.000	Rp 373.704	Rp 113.626.296	Rp 54.000.000	Rp 59.626.296	Rp 3.943.944
68	TK	Rp 66.068.420	Rp 3.303.421	Rp 373.704	Rp 62.391.295	Rp 54.000.000	Rp 8.391.295	Rp 419.565
69	K/1	Rp 73.969.448	Rp 3.698.472	Rp 373.704	Rp 69.897.272	Rp 63.000.000	Rp 6.897.272	Rp 344.864
70	K/1	Rp 71.406.728	Rp 3.570.336	Rp 373.704	Rp 67.462.688	Rp 63.000.000	Rp 4.462.688	Rp 223.134
71	TK	Rp 62.011.112	Rp 3.100.556	Rp 373.704	Rp 58.536.852	Rp 54.000.000	Rp 4.536.852	Rp 226.843
72	TK	Rp 67.136.072	Rp 3.356.804	Rp 373.704	Rp 63.405.564	Rp 54.000.000	Rp 9.405.564	Rp 470.278
73	TK	Rp 93.188.048	Rp 4.659.402	Rp 373.704	Rp 88.154.942	Rp 54.000.000	Rp 34.154.942	Rp 1.707.747
74	TK	Rp 76.959.008	Rp 3.847.950	Rp 373.704	Rp 72.737.354	Rp 54.000.000	Rp 18.737.354	Rp 936.868
75	K/1	Rp 69.271.568	Rp 3.463.578	Rp 373.704	Rp 65.434.286	Rp 63.000.000	Rp 2.434.286	Rp 121.714
Total Pajak Disetor								Rp98.156.240

Sumber: PT. Swastisiddhi Amagra

2. Manajemen Pajak Penghasilan dengan Metode Net

Tabel 3. PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan (Metode Net) PT. Swastisiddhi Amagra Tahun 2019

No	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
1	K/2	Rp 87.817.352	Rp 4.390.868	Rp 373.704	Rp 83.052.780	Rp 67.500.00 0	Rp 14.431.668	Rp 721.583
2	K/1	Rp 78.240.920	Rp 3.912.046	Rp 373.704	Rp 73.955.170	Rp 63.000.00 0	Rp 10.955.170	Rp 547.759
3	K/3	Rp 95.257.532	Rp 4.762.877	Rp 373.704	Rp 90.120.951	Rp 72.000.00 0	Rp 18.120.951	Rp 906.048
4	K/1	Rp 88.965.069	Rp 4.448.253	Rp 373.704	Rp 84.143.112	Rp 63.000.00 0	Rp 21.143.112	Rp 1.057.156
5	K/2	Rp 79.320.980	Rp 3.966.049	Rp 373.704	Rp 74.981.227	Rp 67.500.00 0	Rp 7.481.227	Rp 374.061
6	TK	Rp 84.432.908	Rp 4.221.645	Rp 373.704	Rp 79.837.559	Rp 54.000.00 0	Rp 25.837.559	Rp 1.291.878
7	K/1	Rp 88.917.908	Rp 4.445.895	Rp 373.704	Rp 84.098.309	Rp 63.000.00 0	Rp 21.098.309	Rp 1.054.915
8	K/1	Rp 331.009.28 1	Rp 6.000.000	Rp 373.704	Rp 324.635.577	Rp 63.000.00 0	Rp 261.635.57 7	Rp 35.408.894
9	K/1	Rp 70.339.268	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 66.448.601	Rp 63.000.00 0	Rp 3.448.601	Rp 172.430
10	K/1	Rp 82.348.568	Rp 4.117.428	Rp 373.704	Rp 77.857.436	Rp 63.000.00 0	Rp 14.857.436	Rp 742.872
11	TK	Rp 70.339.268	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 66.448.601	Rp 54.000.00 0	Rp 12.448.601	Rp 622.430
12	TK	Rp 66.068.468	Rp 3.303.423	Rp 373.704	Rp 62.391.341	Rp 54.000.00 0	Rp 8.391.341	Rp 419.567
13	K/1	Rp 80.162.108	Rp 4.008.105	Rp 373.704	Rp 75.780.299	Rp 63.000.00 0	Rp 12.780.299	Rp 639.015
14	K/1	Rp 70.339.220	Rp 3.516.961	Rp 373.704	Rp 66.448.555	Rp 63.000.00 0	Rp 3.448.555	Rp 172.428
15	TK	Rp 88.063.088	Rp 4.403.154	Rp 373.704	Rp 83.286.230	Rp 54.000.00 0	Rp 29.286.230	Rp 1.464.311
16	K/1	Rp 70.339.268	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 66.448.601	Rp 63.000.00 0	Rp 3.448.601	Rp 172.430
17	K/1	Rp 82.129.760	Rp 4.106.488	Rp 373.704	Rp 77.649.568	Rp 63.000.00 0	Rp 14.649.568	Rp 732.478
18	K/2	Rp 84.432.908	Rp 4.221.645	Rp 373.704	Rp 79.837.559	Rp 67.500.00 0	Rp 12.337.559	Rp 616.878
19	K/2	Rp 88.917.248	Rp 4.445.862	Rp 373.704	Rp 84.097.682	Rp 67.500.00 0	Rp 16.597.682	Rp 829.884
20	TK	Rp 80.162.108	Rp 4.008.105	Rp 373.704	Rp 75.780.299	Rp 54.000.00 0	Rp 21.780.299	Rp 1.089.015

No	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
21	TK	Rp 72.306.968	Rp 3.615.348	Rp 373.704	Rp 68.317.916	Rp 54.000.000	Rp 14.317.916	Rp 715.896
22	K/1	Rp 84.219.368	Rp 4.210.968	Rp 373.704	Rp 79.634.696	Rp 63.000.000	Rp 16.634.696	Rp 831.735
23	K/1	Rp 75.250.688	Rp 3.762.534	Rp 373.704	Rp 71.114.450	Rp 63.000.000	Rp 8.114.450	Rp 405.722
24	K/1	Rp 69.698.648	Rp 3.484.932	Rp 373.704	Rp 65.840.012	Rp 63.000.000	Rp 2.840.012	Rp 142.001
25	TK	Rp 86.568.308	Rp 4.328.415	Rp 373.704	Rp 81.866.189	Rp 54.000.000	Rp 27.866.189	Rp 1.393.309
26	TK	Rp 67.349.708	Rp 3.367.485	Rp 373.704	Rp 63.608.519	Rp 54.000.000	Rp 9.608.519	Rp 480.426
27	TK	Rp 81.016.268	Rp 4.050.813	Rp 373.704	Rp 76.591.751	Rp 54.000.000	Rp 22.591.751	Rp 1.129.588
28	TK	Rp 67.990.328	Rp 3.399.516	Rp 373.704	Rp 64.217.108	Rp 54.000.000	Rp 10.217.108	Rp 510.855
29	TK	Rp 65.427.848	Rp 3.271.392	Rp 373.704	Rp 61.782.752	Rp 54.000.000	Rp 7.782.752	Rp 389.138
30	K/0	Rp 67.349.420	Rp 3.367.471	Rp 373.704	Rp 63.608.245	Rp 58.500.000	Rp 5.108.245	Rp 255.412
31	TK	Rp 67.349.420	Rp 3.367.471	Rp 373.704	Rp 63.608.245	Rp 54.000.000	Rp 9.608.245	Rp 480.412
32	TK	Rp 85.287.068	Rp 4.264.353	Rp 373.704	Rp 80.649.011	Rp 54.000.000	Rp 26.649.011	Rp 1.332.451
33	K/2	Rp 88.917.248	Rp 4.445.862	Rp 373.704	Rp 84.097.682	Rp 67.500.000	Rp 16.597.682	Rp 829.884
34	K/0	Rp 89.130.740	Rp 4.456.537	Rp 373.704	Rp 84.300.499	Rp 58.500.000	Rp 25.800.499	Rp 1.290.025
35	K/3	Rp 86.354.768	Rp 4.317.738	Rp 373.704	Rp 81.663.326	Rp 72.000.000	Rp 9.663.326	Rp 483.166
36	TK	Rp 71.152.712	Rp 3.557.636	Rp 373.704	Rp 67.221.372	Rp 54.000.000	Rp 13.221.372	Rp 661.069
37	TK	Rp 88.276.628	Rp 4.413.831	Rp 373.704	Rp 83.489.093	Rp 54.000.000	Rp 29.489.093	Rp 1.474.455
38	K/2	Rp 87.636.008	Rp 4.381.800	Rp 373.704	Rp 82.880.504	Rp 67.500.000	Rp 15.380.504	Rp 769.025
39	TK	Rp 81.443.300	Rp 4.072.165	Rp 373.704	Rp 76.997.431	Rp 54.000.000	Rp 22.997.431	Rp 1.149.872
40	TK	Rp 83.151.572	Rp 4.157.579	Rp 373.704	Rp 78.620.289	Rp 54.000.000	Rp 24.620.289	Rp 1.231.014

No	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
41	K/1	Rp 122.950.540	Rp 6.000.000	Rp 373.704	Rp 116.576.836	Rp 63.000.000	Rp 53.576.836	Rp 3.036.525
42	TK	Rp 86.100.608	Rp 4.305.030	Rp 373.704	Rp 81.421.874	Rp 54.000.000	Rp 27.421.874	Rp 1.371.094
43	TK	Rp 88.276.628	Rp 4.413.831	Rp 373.704	Rp 83.489.093	Rp 54.000.000	Rp 29.489.093	Rp 1.474.455
44	TK	Rp 85.073.528	Rp 4.253.676	Rp 373.704	Rp 80.446.148	Rp 54.000.000	Rp 26.446.148	Rp 1.322.307
45	TK	Rp 83.365.208	Rp 4.168.260	Rp 373.704	Rp 78.823.244	Rp 54.000.000	Rp 24.823.244	Rp 1.241.162
46	TK	Rp 70.339.268	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 66.448.601	Rp 54.000.000	Rp 12.448.601	Rp 622.430
47	TK	Rp 67.990.280	Rp 3.399.514	Rp 373.704	Rp 64.217.062	Rp 54.000.000	Rp 10.217.062	Rp 510.853
48	K/1	Rp 77.813.168	Rp 3.890.658	Rp 373.704	Rp 73.548.806	Rp 63.000.000	Rp 10.548.806	Rp 527.440
49	TK	Rp 76.959.008	Rp 3.847.950	Rp 373.704	Rp 72.737.354	Rp 54.000.000	Rp 18.737.354	Rp 936.868
50	TK	Rp 88.276.628	Rp 4.413.831	Rp 373.704	Rp 83.489.093	Rp 54.000.000	Rp 29.489.093	Rp 1.474.455
51	TK	Rp 74.396.528	Rp 3.719.826	Rp 373.704	Rp 70.302.998	Rp 54.000.000	Rp 16.302.998	Rp 815.150
52	K/2	Rp 78.667.280	Rp 3.933.364	Rp 373.704	Rp 74.360.212	Rp 67.500.000	Rp 6.860.212	Rp 343.011
53	TK	Rp 80.162.108	Rp 4.008.105	Rp 373.704	Rp 75.780.299	Rp 54.000.000	Rp 21.780.299	Rp 1.089.015
54	TK	Rp 84.005.780	Rp 4.200.289	Rp 373.704	Rp 79.431.787	Rp 54.000.000	Rp 25.431.787	Rp 1.271.589
55	K/2	Rp 75.677.768	Rp 3.783.888	Rp 373.704	Rp 71.520.176	Rp 67.500.000	Rp 4.020.176	Rp 201.009
56	K/2	Rp 78.453.788	Rp 3.922.689	Rp 373.704	Rp 74.157.395	Rp 67.500.000	Rp 6.657.395	Rp 332.870
57	TK	Rp 65.854.928	Rp 3.292.746	Rp 373.704	Rp 62.188.478	Rp 54.000.000	Rp 8.188.478	Rp 409.424
58	TK	Rp 85.500.608	Rp 4.275.030	Rp 373.704	Rp 80.851.874	Rp 54.000.000	Rp 26.851.874	Rp 1.342.594
59	K/1	Rp 81.443.252	Rp 4.072.163	Rp 373.704	Rp 76.997.385	Rp 63.000.000	Rp 13.997.385	Rp 699.869
60	TK	Rp 70.339.268	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 66.448.601	Rp 54.000.000	Rp 12.448.601	Rp 622.430

No	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
61	TK	Rp 70.339.268	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 66.448.601	Rp 54.000.000	Rp 12.448.601	Rp 622.430
62	K/1	Rp 86.914.148	Rp 4.345.707	Rp 373.704	Rp 82.194.737	Rp 63.000.000	Rp 19.194.737	Rp 959.737
63	TK	Rp 88.276.628	Rp 4.413.831	Rp 373.704	Rp 83.489.093	Rp 54.000.000	Rp 29.489.093	Rp 1.474.455
64	TK	Rp 65.641.340	Rp 3.282.067	Rp 373.704	Rp 61.985.569	Rp 54.000.000	Rp 7.985.569	Rp 399.278
65	TK	Rp 85.287.068	Rp 4.264.353	Rp 373.704	Rp 80.649.011	Rp 54.000.000	Rp 26.649.011	Rp 1.332.451
66	K/1	Rp 73.801.748	Rp 3.690.087	Rp 373.704	Rp 69.737.957	Rp 63.000.000	Rp 6.737.957	Rp 336.898
67	TK	Rp 120.000.000	Rp 6.000.000	Rp 373.704	Rp 113.626.296	Rp 54.000.000	Rp 59.626.296	Rp 3.943.944
68	TK	Rp 66.068.420	Rp 3.303.421	Rp 373.704	Rp 62.391.295	Rp 54.000.000	Rp 8.391.295	Rp 419.565
69	K/1	Rp 73.969.448	Rp 3.698.472	Rp 373.704	Rp 69.897.272	Rp 63.000.000	Rp 6.897.272	Rp 344.864
70	K/1	Rp 71.406.728	Rp 3.570.336	Rp 373.704	Rp 67.462.688	Rp 63.000.000	Rp 4.462.688	Rp 223.134
71	TK	Rp 62.011.112	Rp 3.100.556	Rp 373.704	Rp 58.536.852	Rp 54.000.000	Rp 4.536.852	Rp 226.843
72	TK	Rp 67.136.072	Rp 3.356.804	Rp 373.704	Rp 63.405.564	Rp 54.000.000	Rp 9.405.564	Rp 470.278
73	TK	Rp 93.188.048	Rp 4.659.402	Rp 373.704	Rp 88.154.942	Rp 54.000.000	Rp 34.154.942	Rp 1.707.747
74	TK	Rp 76.959.008	Rp 3.847.950	Rp 373.704	Rp 72.737.354	Rp 54.000.000	Rp 18.737.354	Rp 936.868
75	K/1	Rp 69.271.568	Rp 3.463.578	Rp 373.704	Rp 65.434.286	Rp 63.000.000	Rp 2.434.286	Rp 121.714
Total Pajak Disetor								Rp 98.156.240

Sumber: PT. Swastisiddhi Amagra

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat pajak pasal 21, pada metode *net* ini pajak Penghasilan pasal 21 akan ditanggung oleh perusahaan sehingga penghasilan bersih karyawan tidak berkurang, namun seluruh pengeluaran untuk pembayaran pajak tersebut tidak dapat menjadi biaya fiskal pada saat perhitungan badan, sehingga akan terkoreksi fiskal positif. Berikut perhitungan dampak penggunaan metode *net* atau pajak ditanggung perusahaan pada PPh badan berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak pada tarif progresif pasal 17 UU PPh:

a. Penghasilan kena pajak s/d 50.000.000

Pegawai tetap: Robert Simanungkalit (K/3)

Penghasilan Kena Pajak

Rp 18.120.951

PPh Pasal 21 setahun:

$$5\% \times 18.120.951 = \text{Rp } 906.048$$

Jumlah PPh pasal 21 sebesar Rp 906.048 akan ditanggung oleh perusahaan sehingga penghasilan bersih karyawan tidak berkurang. Namun, atas pengeluaran pajak tersebut tidak dapat menjadi biaya fiskal bagi perusahaan, sehingga PPh badan akan bertambah sebesar:

$$\text{PPh Badan} = 22\% \times 906.048 = 199.331$$

b. Penghasilan Kena Pajak 50.000.000 s/d 250.000.000

Pegawai tetap: Kayono (K/1)

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Rp } 53.576.836$$

PPh Pasal 21 setahun:

$$5\% \times 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times 3.576.836 = \text{Rp } 536.525+$$

$$\text{Rp } 3.036.525$$

Jumlah PPh pasal 21 sebesar Rp 3.036.525 akan ditanggung oleh perusahaan sehingga penghasilan bersih karyawan tidak berkurang. Namun, atas pengeluaran pajak tersebut tidak dapat menjadi biaya fiskal bagi perusahaan, sehingga PPh badan akan bertambah sebesar:

$$\text{PPh Badan} = 22\% \times 3.036.525 = 668.036$$

c. Penghasilan Kena Pajak 250.000.000 s/d 500.000.000

Pegawai tetap: Robert Simanungkalit (K/3)

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Rp } 261.635.577$$

PPh Pasal 21 setahun:

$$5\% \times 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times 200.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$$

$$25\% \times 11.635.577 = \text{Rp } 2.908.894+$$

$$\text{Rp } 35.408.894$$

Jumlah PPh pasal 21 sebesar Rp 35.408.894 akan ditanggung oleh perusahaan sehingga penghasilan bersih karyawan tidak berkurang. Namun, atas pengeluaran pajak tersebut tidak dapat menjadi biaya fiskal bagi perusahaan, sehingga PPh badan akan bertambah sebesar:

$$\text{PPh Badan} = 22\% \times 35.408.894 = 7.710.757$$

3. Manajemen Pajak Penghasilan dengan Metode *Gross Up*

Tabel 4. Perusahaan Memberikan Tunjangan Pajak (Metode *Gross Up*) PT. Swastisiddhi Amagra Tahun 2019

No	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
1	K/2	Rp 88.635.919	Rp 4.390.868	Rp 373.704	Rp 83.871.347	Rp 7.500.000	Rp 16.371.347	Rp 818.567
2	K/1	Rp 78.817.508	Rp 3.912.046	Rp 373.704	Rp 74.531.758	Rp 63.000.000	Rp 11.531.758	Rp 576.588
3	K/3	Rp 96.211.266	Rp 4.762.877	Rp 373.704	Rp 91.074.685	Rp 72.000.000	Rp 19.074.685	Rp 953.734
4	K/1	Rp 90.077.864	Rp 4.448.253	Rp 373.704	Rp 85.255.907	Rp 63.000.000	Rp 22.255.907	Rp 1.112.795
5	K/2	Rp 79.714.729	Rp 3.966.049	Rp 373.704	Rp 75.374.976	Rp 67.500.000	Rp 7.874.976	Rp 393.749
6	TK	Rp 85.792.780	Rp 4.221.645	Rp 373.704	Rp 81.197.431	Rp 54.000.000	Rp 27.197.431	Rp 1.359.872
7	K/1	Rp 90.027.652	Rp 4.445.895	Rp 373.704	Rp 85.208.053	Rp 63.000.000	Rp 22.208.053	Rp 1.110.403

No	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
8	K/1	Rp 378.221.140	Rp 6.000.000	Rp 373.704	Rp 371.847.436	Rp 63.000.000	Rp 308.847.436	Rp 47.211.859
9	K/1	Rp 70.520.773	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 66.630.106	Rp 63.000.000	Rp 3.630.106	Rp 181.505
10	K/1	Rp 83.130.538	Rp 4.117.428	Rp 373.704	Rp 78.639.406	Rp 63.000.000	Rp 15.639.406	Rp 781.970
11	TK	Rp 70.994.458	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 67.103.791	Rp 54.000.000	Rp 13.103.791	Rp 655.190
12	TK	Rp 66.510.118	Rp 3.303.423	Rp 373.704	Rp 62.832.991	Rp 54.000.000	Rp 8.832.991	Rp 441.650
13	K/1	Rp 80.834.755	Rp 4.008.105	Rp 373.704	Rp 76.452.946	Rp 63.000.000	Rp 13.452.946	Rp 672.647
14	K/1	Rp 70.520.723	Rp 3.516.961	Rp 373.704	Rp 66.630.058	Rp 63.000.000	Rp 3.630.058	Rp 181.503
15	TK	Rp 89.130.784	Rp 4.403.154	Rp 373.704	Rp 84.353.926	Rp 54.000.000	Rp 30.353.926	Rp 1.517.696
16	K/1	Rp 70.520.773	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 66.630.106	Rp 63.000.000	Rp 3.630.106	Rp 181.505
17	K/1	Rp 82.900.790	Rp 4.106.488	Rp 373.704	Rp 78.420.598	Rp 63.000.000	Rp 15.420.598	Rp 771.030
18	K/2	Rp 85.082.253	Rp 4.221.645	Rp 373.704	Rp 80.486.904	Rp 67.500.000	Rp 12.986.904	Rp 649.345
19	K/2	Rp 89.790.810	Rp 4.445.862	Rp 373.704	Rp 84.971.244	Rp 67.500.000	Rp 17.471.244	Rp 873.562
20	TK	Rp 81.308.440	Rp 4.008.105	Rp 373.704	Rp 76.926.631	Rp 54.000.000	Rp 22.926.631	Rp 1.146.332
21	TK	Rp 73.060.543	Rp 3.615.348	Rp 373.704	Rp 69.071.491	Rp 54.000.000	Rp 15.071.491	Rp 753.575
22	K/1	Rp 85.094.878	Rp 4.210.968	Rp 373.704	Rp 80.510.206	Rp 63.000.000	Rp 17.510.206	Rp 875.510
23	K/1	Rp 75.677.764	Rp 3.762.534	Rp 373.704	Rp 71.541.526	Rp 63.000.000	Rp 8.541.526	Rp 427.076
24	K/1	Rp 69.848.122	Rp 3.484.932	Rp 373.704	Rp 65.989.486	Rp 63.000.000	Rp 2.989.486	Rp 149.474
25	TK	Rp 87.561.265	Rp 4.328.415	Rp 373.704	Rp 82.859.146	Rp 54.000.000	Rp 28.859.146	Rp 1.442.957
26	TK	Rp 67.855.420	Rp 3.367.485	Rp 373.704	Rp 64.114.231	Rp 54.000.000	Rp 10.114.231	Rp 505.712

No	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
27	TK	Rp 82.205.308	Rp 4.050.813	Rp 373.704	Rp 77.780.791	Rp 54.000.00 0	Rp 23.780.791	Rp 1.189.040
28	TK	Rp 68.526.071	Rp 3.399.516	Rp 373.704	Rp 64.752.851	Rp 54.000.00 0	Rp 10.752.851	Rp 537.643
29	TK	Rp 65.837.467	Rp 3.271.392	Rp 373.704	Rp 62.192.371	Rp 54.000.00 0	Rp 8.192.371	Rp 409.619
30	K/0	Rp 86.677.022	Rp 3.367.471	Rp 373.704	Rp 82.935.847	Rp 58.500.00 0	Rp 24.435.847	Rp 1.221.792
31	TK	Rp 67.855.117	Rp 3.367.471	Rp 373.704	Rp 64.113.942	Rp 54.000.00 0	Rp 10.113.942	Rp 505.697
32	TK	Rp 86.689.648	Rp 4.264.353	Rp 373.704	Rp 82.051.591	Rp 54.000.00 0	Rp 28.051.591	Rp 1.402.580
33	K/2	Rp 89.790.810	Rp 4.445.862	Rp 373.704	Rp 84.971.244	Rp 67.500.00 0	Rp 17.471.244	Rp 873.562
34	K/0	Rp 90.488.661	Rp 4.456.537	Rp 373.704	Rp 85.658.420	Rp 58.500.00 0	Rp 27.158.420	Rp 1.357.921
35	K/3	Rp 86.863.364	Rp 4.317.738	Rp 373.704	Rp 82.171.922	Rp 72.000.00 0	Rp 10.171.922	Rp 508.596
36	TK	Rp 71.848.574	Rp 3.557.636	Rp 373.704	Rp 67.917.234	Rp 54.000.00 0	Rp 13.917.234	Rp 695.862
37	TK	Rp 89.828.686	Rp 4.413.831	Rp 373.704	Rp 85.041.151	Rp 54.000.00 0	Rp 31.041.151	Rp 1.552.058
38	K/2	Rp 88.445.508	Rp 4.381.800	Rp 373.704	Rp 83.690.004	Rp 67.500.00 0	Rp 16.190.004	Rp 809.500
39	TK	Rp 82.653.691	Rp 4.072.165	Rp 373.704	Rp 78.207.822	Rp 54.000.00 0	Rp 24.207.822	Rp 1.210.391
40	TK	Rp 84.447.377	Rp 4.157.579	Rp 373.704	Rp 79.916.094	Rp 54.000.00 0	Rp 25.916.094	Rp 1.295.805
41	K/1	Rp 126.522.92 3	Rp 6.000.000	Rp 373.704	Rp 120.149.219	Rp 63.000.00 0	Rp 57.149.219	Rp 3.572.383
42	TK	Rp 87.543.865	Rp 4.305.030	Rp 373.704	Rp 82.865.131	Rp 54.000.00 0	Rp 28.865.131	Rp 1.443.257
43	TK	Rp 89.828.686	Rp 4.413.831	Rp 373.704	Rp 85.041.151	Rp 54.000.00 0	Rp 31.041.151	Rp 1.552.058
44	TK	Rp 86.465.431	Rp 4.253.676	Rp 373.704	Rp 81.838.051	Rp 54.000.00 0	Rp 27.838.051	Rp 1.391.903
45	TK	Rp 84.671.695	Rp 4.168.260	Rp 373.704	Rp 80.129.731	Rp 54.000.00 0	Rp 26.129.731	Rp 1.306.487

No	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
46	TK	Rp 70.994.458	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 67.103.791	Rp 54.000.000	Rp 13.103.791	Rp 655.190
47	TK	Rp 68.528.020	Rp 3.399.514	Rp 373.704	Rp 64.754.802	Rp 54.000.000	Rp 10.754.802	Rp 537.740
48	K/1	Rp 78.368.368	Rp 3.890.658	Rp 373.704	Rp 74.104.006	Rp 63.000.000	Rp 11.104.006	Rp 555.200
49	TK	Rp 77.945.185	Rp 3.847.950	Rp 373.704	Rp 73.723.531	Rp 54.000.000	Rp 19.723.531	Rp 986.177
50	TK	Rp 89.828.686	Rp 4.413.831	Rp 373.704	Rp 85.041.151	Rp 54.000.000	Rp 31.041.151	Rp 1.552.058
51	TK	Rp 75.254.581	Rp 3.719.826	Rp 373.704	Rp 71.161.051	Rp 54.000.000	Rp 17.161.051	Rp 858.053
52	K/2	Rp 79.028.344	Rp 3.933.364	Rp 373.704	Rp 74.721.276	Rp 67.500.000	Rp 7.221.276	Rp 361.064
53	TK	Rp 81.308.440	Rp 4.008.105	Rp 373.704	Rp 76.926.631	Rp 54.000.000	Rp 22.926.631	Rp 1.146.332
54	TK	Rp 85.344.295	Rp 4.200.289	Rp 373.704	Rp 80.770.302	Rp 54.000.000	Rp 26.770.302	Rp 1.338.515
55	K/2	Rp 75.889.356	Rp 3.783.888	Rp 373.704	Rp 71.731.764	Rp 67.500.000	Rp 4.231.764	Rp 211.588
56	K/2	Rp 85.104.177	Rp 3.922.689	Rp 373.704	Rp 80.807.784	Rp 67.500.000	Rp 13.307.784	Rp 665.389
57	TK	Rp 66.285.865	Rp 3.292.746	Rp 373.704	Rp 62.619.415	Rp 54.000.000	Rp 8.619.415	Rp 430.971
58	TK	Rp 86.913.865	Rp 4.275.030	Rp 373.704	Rp 82.265.131	Rp 54.000.000	Rp 28.265.131	Rp 1.413.257
59	K/1	Rp 82.179.956	Rp 4.072.163	Rp 373.704	Rp 77.734.089	Rp 63.000.000	Rp 14.734.089	Rp 736.704
60	TK	Rp 71.014.126	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 67.123.459	Rp 54.000.000	Rp 13.123.459	Rp 656.173
61	TK	Rp 70.994.458	Rp 3.516.963	Rp 373.704	Rp 67.103.791	Rp 54.000.000	Rp 13.103.791	Rp 655.190
62	K/1	Rp 87.924.397	Rp 4.345.707	Rp 373.704	Rp 83.204.986	Rp 63.000.000	Rp 20.204.986	Rp 1.010.249
63	TK	Rp 89.828.686	Rp 4.413.831	Rp 373.704	Rp 85.041.151	Rp 54.000.000	Rp 31.041.151	Rp 1.552.058
64	TK	Rp 66.061.633	Rp 3.282.067	Rp 373.704	Rp 62.405.862	Rp 54.000.000	Rp 8.405.862	Rp 420.293

No	Status	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
65	TK	Rp 86.689.648	Rp 4.264.353	Rp 373.704	Rp 82.051.591	Rp 54.000.000	Rp 28.051.591	Rp 1.402.580
66	K/1	Rp 74.156.377	Rp 3.690.087	Rp 373.704	Rp 70.092.586	Rp 63.000.000	Rp 7.092.586	Rp 354.629
67	TK	Rp 124.639.934	Rp 6.000.000		Rp 118.639.934	Rp 54.000.000	Rp 64.639.934	Rp 3.656.444
68	TK	Rp 66.510.067	Rp 3.303.421	Rp 373.704	Rp 62.832.942	Rp 54.000.000	Rp 8.832.942	Rp 441.647
69	K/1	Rp 74.332.462	Rp 3.698.472	Rp 373.704	Rp 70.260.286	Rp 63.000.000	Rp 7.260.286	Rp 363.014
70	K/1	Rp 71.641.606	Rp 3.570.336	Rp 373.704	Rp 67.697.566	Rp 63.000.000	Rp 4.697.566	Rp 234.878
71	TK	Rp 62.249.894	Rp 3.100.556	Rp 373.704	Rp 58.775.634	Rp 54.000.000	Rp 4.775.634	Rp 238.782
72	TK	Rp 67.631.102	Rp 3.356.804	Rp 373.704	Rp 63.900.594	Rp 54.000.000	Rp 9.900.594	Rp 495.030
73	TK	Rp 94.985.677	Rp 4.659.402	Rp 373.704	Rp 89.952.571	Rp 54.000.000	Rp 35.952.571	Rp 1.797.629
74	TK	Rp 77.945.185	Rp 3.847.950	Rp 373.704	Rp 73.723.531	Rp 54.000.000	Rp 19.723.531	Rp 986.177
75	K/1	Rp 69.399.688	Rp 3.463.578	Rp 373.704	Rp 65.562.406	Rp 63.000.000	Rp 2.562.406	Rp 128.120
Total Pajak Disetor								Rp 114.423.084

Sumber: PT. Swastisiddhi Amagra

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat besar PPh pasal 21 pada karyawan, pada metode ini perusahaan akan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya. Pada metode ini juga jumlah pajak yang disetor akan lebih besar daripada metode *gross* dan metode *net*, akan tetapi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tunjangan pajak dapat menjadi biaya fiskal bagi perusahaan sehingga tidak akan terkoreksi fiskal positif. Penyebab jumlah pajak yang disetor pada metode *gross up* lebih besar yaitu karena tunjangan pajak merupakan bagian dari penghasilan sehingga penghasilan bruto karyawan bertambah dan PPh pasal 21 juga bertambah. Berikut perhitungan dampak penggunaan metode *gross up* pada PPh Badan berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak pada tarif progresif pasal 17 UU PPh:

a. Penghasilan Kena Pajak s/d 50.000.000

Karyawan Tetap: Yusup Rahrdian (TK)

Penghasilan Kena Pajak

34.154.942

PPh Pasal 21 :

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= (\text{PKP} \times 5\%) / 0.95 \\ &= (34.154.945 \times 5\%) / 0.95 \\ &= 1.797.629 \end{aligned}$$

Tahap 2:

Gaji setahun

82.838.048

Tunjangan dan Lembur

6.850.000

THR	3.500.000
Tunjangan Pajak	<u>1.797.629+</u>
Penghasilan Bruto	94.985.677
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	(4.659.402)
Iuran Pensiun	<u>(373.000) +</u>
Penghasilan Neto:	89.952.571
PTKP	<u>54.000.000+</u>
PKP	35.952.571

PPh Pasal 21:

$$5\% \times 35.952.571 = 1.797.629$$

Perusahaan memberikan tunjangan sebesar 1.797.629, atas tunjangan pajak tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan, sehingga akan memberikan penurunan pajak pada PPh badan sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Penambahan PPh pasal 21 : } & 5\% \times 1.797.629 \\ & = 89.881 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penurunan PPh Badan : } & 22\% \times 1.797.629 \\ & = 395.478 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan rumus *gross up* jumlah pph pasal 21 akan bertambah sebesar 89.881, sedangkan penurunan pph badan sebesar 395.478. Dari hasil perhitungan pada karyawan yang dikenakan lapisan tarif pajak 5% dapat dilihat perusahaan akan mendapat penurunan pajak sebesar 305.597 (395.478-89.881). Hal ini disebabkan karena penurunan PPh Badan lebih besar dibandingkan dengan penambahan pajak pasal 21 yang dibayar, yang artinya penurunan PPh Badan dapat menutupi penambahan pajak penghasilan pasal 21 yang bertambah.

b. Penghasilan Kena Pajak 50.000.000 s/d 250.000.000

Karyawan Tetap: Kasyono (K/1)

Penghasilan Kena Pajak 53.576.836

PPh Pasal 21 :

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= (\text{PKP} \times 15\%) - 5.000.000 / 0.85 \\ &= (53.576.836 \times 15\%) - 5.000.000 / 0.85 \\ &= 3.572.383 \end{aligned}$$

Tahap 2:

Gaji setahun	108.950.540
Tunjangan dan Lembur	7.000.000
THR	3.500.000
Tunjangan Pajak	<u>3.572.383+</u>
Penghasilan Bruto	126.522.923
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	(6.000.000)
Iuran Pensiun	<u>(373.000) +</u>
Penghasilan Neto:	120.149.219
PTKP	<u>63.000.000+</u>
PKP	57.149.219

PPh Pasal 21:

$$5\% \times 50.000.000 = 2.500.000$$

$$\begin{aligned} 15\% \times 57.149.219 &= 8.572.383 \\ & 3.572.383 \end{aligned}$$

Perusahaan memberikan tunjangan sebesar 3.572.383, atas tunjangan pajak tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan, sehingga akan memberikan penurunan pajak pada PPh badan sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Penambahan PPh pasal 21 : } & 15\% \times 3.572.383 \\ & = 535.857 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penurunan PPh Badan : } & 22\% \times 4.202.803 \\ & = 785.924 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan rumus *gross up* jumlah pph pasal 21 akan bertambah sebesar 535.857, sedangkan penurunan PPh badan sebesar 785924. Dari hasil perhitungan pada karyawan yang dikenakan lapisan tarif pajak 15% dapat dilihat perusahaan akan mendapat penurunan pajak sebesar 250.067. Hal ini disebabkan karena penurunan PPh Badan lebih besar dibandingkan dengan penambahan pajak pasal 21 yang dibayar, yang artinya penurunan PPh Badan dapat menutupi penambahan pajak penghasilan pasal 21 yang bertambah.

c. Penghasilan Kena Pajak 250.000.000 s/d 500.000.000

Karyawan Tetap: Afandi Bakri (K/1)

Penghasilan Kena Pajak 261.635.577

PPh Pasal 21 :

Tunjangan Pajak = $(PKP \times 25\%) - 30.000.000 / 0.75$

= $(261.635.577 \times 25\%) - 30.000.000 / 0.75$

= 47.211.859

Tahap 2:

Gaji setahun 309.009.281

Tunjangan dan Lembur 18.500.000

THR 3.500.000

Tunjangan Pajak 47.211.859+

Penghasilan Bruto 378.221.140

Pengurangan:

Biaya Jabatan (6.000.000)

Iuran Pensiun (373.000) +

Penghasilan Neto: 371.847.436

PTKP 63.000.000+

PKP 308.847.436

PPh Pasal 21:

$5\% \times 50.000.000 = 2.500.000$

$15\% \times 200.000.000 = 30.000.000$

$25\% \times 58.847.436 = 14.711.859+$

47.211.859

Perusahaan memberikan tunjangan sebesar 47.211.859, atas tunjangan pajak tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan, sehingga akan memberikan penurunan pajak pada PPh badan sebesar:

Penambahan PPh pasal 21 : $25\% \times 47.211.859$

= 11.802.965

Penurunan PPh Badan : $22\% \times 47.211.859$

= 10.386.609

Dengan menggunakan rumus *gross up* jumlah pph pasal 21 akan bertambah sebesar 11.802.965, sedangkan penurunan pph badan sebesar 10.386.609. Dari hasil perhitungan pada karyawan yang dikenakan lapisan tarif pajak 25% dapat dilihat perusahaan akan mengalami kerugian, karena jumlah pajak pasal 21 yang bertambah lebih besar daripada penurunan PPh Badan. Hal ini disebabkan karena penurunan PPh Badan lebih kecil dibandingkan dengan penambahan pajak pasal 21 yang dibayar, yang artinya penurunan PPh Badan tidak dapat menutupi penambahan pajak penghasilan pasal 21 yang bertambah. Maka metode *gross up* jika diterapkan pada karyawan yang penghasilannya dikenakan tarif pajak 25% akan memberikan kerugian kepada wajib pajak atau perusahaan.

Perbandingan Pajak Terutang Metode Gross, Net dan Gross Up

Tabel 5. Perbandingan Pajak Terutang Metode Gross, Net dan Gross Up

No	Status	Metode Gross	Metode Net	Metode Gross Up	Selisih
1	K/2	Rp 721.583	Rp 721.583	Rp 818.567	Rp 96.984
2	K/1	Rp 547.759	Rp 547.759	Rp 576.588	Rp 28.829
3	K/3	Rp 906.048	Rp 906.048	Rp 953.734	Rp 47.687

No	Status	Metode Gross	Metode Net	Metode Gross Up	Selisih
4	K/1	Rp 1.057.156	Rp 1.057.156	Rp 1.112.795	Rp 55.640
5	K/2	Rp 374.061	Rp 374.061	Rp 393.749	Rp 19.687
6	TK	Rp 1.291.878	Rp 1.291.878	Rp 1.359.872	Rp 67.994
7	K/1	Rp 1.054.915	Rp 1.054.915	Rp 1.110.403	Rp 55.487
8	K/1	Rp 35.408.894	Rp 35.408.894	Rp 47.211.859	Rp 11.802.965
9	K/1	Rp 172.430	Rp 172.430	Rp 181.505	Rp 9.075
10	K/1	Rp 742.872	Rp 742.872	Rp 781.970	Rp 39.099
11	TK	Rp 622.430	Rp 622.430	Rp 655.190	Rp 32.759
12	TK	Rp 419.567	Rp 419.567	Rp 441.650	Rp 22.083
13	K/1	Rp 639.015	Rp 639.015	Rp 672.647	Rp 33.632
14	K/1	Rp 172.428	Rp 172.428	Rp 181.503	Rp 9.075
15	TK	Rp 1.464.311	Rp 1.464.311	Rp 1.517.696	Rp 53.385
16	K/1	Rp 172.430	Rp 172.430	Rp 181.505	Rp 9.075
17	K/1	Rp 732.478	Rp 732.478	Rp 771.030	Rp 38.552
18	K/2	Rp 616.878	Rp 616.878	Rp 649.345	Rp 32.467
19	K/2	Rp 829.884	Rp 829.884	Rp 873.562	Rp 43.678
20	TK	Rp 1.089.015	Rp 1.089.015	Rp 1.146.332	Rp 57.317
21	TK	Rp 715.896	Rp 715.896	Rp 753.575	Rp 37.679
22	K/1	Rp 831.735	Rp 831.735	Rp 875.510	Rp 43.776
23	K/1	Rp 405.722	Rp 405.722	Rp 427.076	Rp 21.354
24	K/1	Rp 142.001	Rp 142.001	Rp 149.474	Rp 7.474
25	TK	Rp 1.393.309	Rp 1.393.309	Rp 1.442.957	Rp 49.648
26	TK	Rp 480.426	Rp 480.426	Rp 505.712	Rp 25.286
27	TK	Rp 1.129.588	Rp 1.129.588	Rp 1.189.040	Rp 59.452
28	TK	Rp 510.855	Rp 510.855	Rp 537.643	Rp 26.787
29	TK	Rp 389.138	Rp 389.138	Rp 409.619	Rp 20.481
30	K/0	Rp 255.412	Rp 255.412	Rp 1.221.792	Rp 966.380
31	TK	Rp 480.412	Rp 480.412	Rp 505.697	Rp 25.285
32	TK	Rp 1.332.451	Rp 1.332.451	Rp 1.402.580	Rp 70.129
33	K/2	Rp 829.884	Rp 829.884	Rp 873.562	Rp 43.678
34	K/0	Rp 1.290.025	Rp 1.290.025	Rp 1.357.921	Rp 67.896
35	K/3	Rp 483.166	Rp 483.166	Rp 508.596	Rp 25.430
36	TK	Rp 661.069	Rp 661.069	Rp 695.862	Rp 34.793
37	TK	Rp 1.474.455	Rp 1.474.455	Rp 1.552.058	Rp 77.603
38	K/2	Rp 769.025	Rp 769.025	Rp 809.500	Rp 40.475
39	TK	Rp 1.149.872	Rp 1.149.872	Rp 1.210.391	Rp 60.520
40	TK	Rp 1.231.014	Rp 1.231.014	Rp 1.295.805	Rp 64.790
41	K/1	Rp 3.036.525	Rp 3.036.525	Rp 3.572.383	Rp 535.858
42	TK	Rp 1.371.094	Rp 1.371.094	Rp 1.443.257	Rp 72.163
43	TK	Rp 1.474.455	Rp 1.474.455	Rp 1.552.058	Rp 77.603
44	TK	Rp 1.322.307	Rp 1.322.307	Rp 1.391.903	Rp 69.595
45	TK	Rp 1.241.162	Rp 1.241.162	Rp 1.306.487	Rp 65.324
46	TK	Rp 622.430	Rp 622.430	Rp 655.190	Rp 32.759
47	TK	Rp 510.853	Rp 510.853	Rp 537.740	Rp 26.887
48	K/1	Rp 527.440	Rp 527.440	Rp 555.200	Rp 27.760

No	Status	Metode Gross	Metode Net	Metode Gross Up	Selisih
49	TK	Rp 936.868	Rp 936.868	Rp 986.177	Rp 49.309
50	TK	Rp 1.474.455	Rp 1.474.455	Rp 1.552.058	Rp 77.603
51	TK	Rp 815.150	Rp 815.150	Rp 858.053	Rp 42.903
52	K/2	Rp 343.011	Rp 343.011	Rp 361.064	Rp 18.053
53	TK	Rp 1.089.015	Rp 1.089.015	Rp 1.146.332	Rp 57.317
54	TK	Rp 1.271.589	Rp 1.271.589	Rp 1.338.515	Rp 66.926
55	K/2	Rp 201.009	Rp 201.009	Rp 211.588	Rp 10.579
56	K/2	Rp 332.870	Rp 332.870	Rp 665.389	Rp 332.519
57	TK	Rp 409.424	Rp 409.424	Rp 430.971	Rp 21.547
58	TK	Rp 1.342.594	Rp 1.342.594	Rp 1.413.257	Rp 70.663
59	K/1	Rp 699.869	Rp 699.869	Rp 736.704	Rp 36.835
60	TK	Rp 622.430	Rp 622.430	Rp 656.173	Rp 33.743
61	TK	Rp 622.430	Rp 622.430	Rp 655.190	Rp 32.759
62	K/1	Rp 959.737	Rp 959.737	Rp 1.010.249	Rp 50.512
63	TK	Rp 1.474.455	Rp 1.474.455	Rp 1.552.058	Rp 77.603
64	TK	Rp 399.278	Rp 399.278	Rp 420.293	Rp 21.015
65	TK	Rp 1.332.451	Rp 1.332.451	Rp 1.402.580	Rp 70.129
66	K/1	Rp 336.898	Rp 336.898	Rp 354.629	Rp 17.731
67	TK	Rp 3.943.944	Rp 3.943.944	Rp 3.656.444	-Rp 287.500
68	TK	Rp 419.565	Rp 419.565	Rp 441.647	Rp 22.082
69	K/1	Rp 344.864	Rp 344.864	Rp 363.014	Rp 18.151
70	K/1	Rp 223.134	Rp 223.134	Rp 234.878	Rp 11.744
71	TK	Rp 226.843	Rp 226.843	Rp 238.782	Rp 11.939
72	TK	Rp 470.278	Rp 470.278	Rp 495.030	Rp 24.752
73	TK	Rp 1.707.747	Rp 1.707.747	Rp 1.797.629	Rp 89.881
74	TK	Rp 936.868	Rp 936.868	Rp 986.177	Rp 49.309
75	K/1	Rp 121.714	Rp 121.714	Rp 128.120	Rp 6.406
Total Pajak Disetor		Rp 98.156.240	Rp 98.156.240	Rp 114.423.084	Rp 16.266.844

Sumber: PT. Swastisiddhi Amagra

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dilihat jumlah pajak terutang antara metode *gross*, *net* dengan metode *gross up*. Jumlah pajak yang disetor pada metode *gross* dan *net* sebesar 98.156.240 sedangkan pada metode *gross up* sebesar 114.423.084 terdapat selisih 16.266.844 penyebab terjadinya perbedaan jumlah pajak antara metode *gross* dan *net* dengan metode *gross up* karena pada metode *gross up* pemberian tunjangan pajak kepada karyawan menjadi bagian penghasilan bagi karyawan sehingga penghasilan *bruto* karyawan bertambah dan PPh pasal 21 juga bertambah, pada metode *gross up* dilakukan 2 tahap dimana pada tahap pertama mencari jumlah penghasilan kena pajak tanpa tunjangan pajak kemudian dihitung tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up*. Setelah jumlah tunjangan pajak diperoleh tunjangan pajak tersebut akan ditambahkan sebagai penghasilan sehingga penghasilan *bruto* karyawan bertambah dan PPh pasal 21 juga akan bertambah.

Dari perhitungan dampak menggunakan metode *gross*, *net* dan *gross up* terhadap PPh Badan, dapat dilihat bahwa metode *gross up* hanya memberikan manfaat penurunan PPh Badan kepada perusahaan jika diberikan kepada karyawan yang lapisan gajinya dikenakan tarif pajak 5% dan 15%, sedangkan pada karyawan yang lapisan gajinya dikenakan tarif 25% perusahaan tidak mendapatkan manfaat penurunan PPh Badan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan pada pembahasan maka dapat disimpulkan penerapan manajemen pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Swastisiddhi Amagra menggunakan metode *gross* perusahaan merasa diuntungkan karena pajak penghasilan tidak menjadi tanggungan perusahaan tersebut. Namun dengan menggunakan metode ini karyawan merasa tidak diuntungkan karena penghasilan bersih karyawan akan berkurang. Sehingga menggunakan metode ini kurang efisien, menggunakan metode *net* mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Dimana pengeluaran untuk pembayaran pajak penghasilan tersebut tidak dapat menjadi biaya fiskal pada saat perhitungan PPh badan, perhitungan menggunakan metode *gross up* dilakukan dengan 2 tahap. Metode ini lebih efisien dibandingkan dengan kedua metode *gross* dan *net* karena menguntungkan kedua belah pihak baik karyawan maupun perusahaan. Dimana dengan menggunakan metode ini semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tunjangan pajak dapat menjadi biaya fiskal bagi perusahaan sehingga tidak akan terkoreksi fiskal positif. Serta penghasilan yang diperoleh karyawan akan lebih besar karena penghasilan yang diperoleh ditambah dengan tunjangan pajak.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil dari kesimpulan di atas PT. Swastisiddhi Amagra dapat mempertimbangkan metode *gross up* atau memberikan tunjangan kepada karyawan karena dapat meminimalkan beban pajak dan memberikan kesejahteraan serta memberi motivasi bagi karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastri M, Januri, Dalimunthe, Hermansyah, Mohd. Idris, Wahyudi, Hery dan Hasbiana. 2015. Perpajakan, Teori dan Kasus. Medan: Perdana Publishing.
- Burhanudin, Desi Lisdiana. 2015. Analisis Perbandingan Metode Gross Up dan Net Sebagai Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT. Wahana Ottomira Tbk. *Jurnal Akuntansi*. Vol 2 No 1
- Djajadiningrat. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2010. Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Gramedia.
- Putra, Atri Nodi Maiza. 2022. Analisis Perbedaan Metode Gross Up Dengan Metode Net Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol 6 No 2.
- Ramba, Pray Britney B, F. M. Sumual, R. Winerungun. 2022. Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Net Method dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataran. *Jurnal Akuntansi Manado*. Vol 3 No 1.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan: teori dan kasus Edisi 9. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 2013. Perpajakan Edisi Revisi 2013. Bandung: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Urkan, Adinul, R. E. Putra. 2017. Analisis Perbandingan Perhitungan Pasal 21 Metode Gross Up Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT. Dredolf Indonesia. *Jurnal Measurement*. Vol 11 No 1.
- Vridag, Rizky Vinecentius D. P. 2015. Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji Dan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Satori Tepas Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 3 No.4.